

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester i Tahun 2014*. <http://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester ii Tahun 2014*. <http://www.bpk.go.id>
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Carnegie and West. 2005. *Making Accounting Accountable in Public Sector Critical Perspective On Accounting*. Vol. 16, pp.905-928.
- Departemen Dalam Negeri. 2013. APBD. Anggaran – 2013. Permendagri. <http://djpk.depkeu.go.id>
- Departemen Dalam Negeri. 2013. APBD. Data Realisasi APBD TA 2013. SAP. Permendagri. <http://djpk.depkeu.go.id>
- Departemen Dalam Negeri. 2013. APBD. Neraca 2013. <http://djpk.depkeu.go.id>
- Fontanella, Amy dan Rossieta, Hilda. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. SNA XVII Makalah Nomor 175 (<http://multiparadigmalecture.ub.ac.id>, diakses pada 19 Desember 2014)
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 20*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Heriningsih, Sucahyo dan Ruserlistyani. 2013. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal ekonomi dan Bisnis, Volume 13. Nomor 02, September 2013
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, A dan Abdullah, S. 2006. *Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah daerah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol. 2 No. 1
- Hilmi, Zul, Amiruddin dan Martani, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah*

Provinsi. Forum: SNA XV. (<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>, diakses pada 16 April 2014).

Julitawati, Ebit. Darwanis dan Jalaluddin. 2012. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (Vol. 1, No. 1; 15-29)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 – 4761 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2013.

Kusumawardani, Media. 2012. *Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Laverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Inonesia*. *Accounting Analysis Journal* 1

Liu, Chih Hung. 2007. *What Type of Fiscal Decentralization System has better Performance*. *School of Public Policy*.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

Moisiu, Alexander. 2013. *Dezentralizations and The Increased autonomy in Local Governments*, *Procedia-Social and Behavioral Science*, pp.459-463.

Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasisi, Debby. 2012. *Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*. Simposium Nasional Akuntansi Indonesia 15. (<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>,. Forum: diakses pada 16 April 2014)

Nordiawan. Deddy dan Ayuningtyas Hertiyani. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.

Nugroho, Fajar. 2012. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Intervening*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang

Nuritomo, Rossieta Hilda. 2014. *Politik Dinasti, Akuntabilitas dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. SNA 17 Makalah Nomor 173 (<http://multiparadigmalecture.ub.ac.id>, diakses pada 19 Desember 2014)

Patrick, Patricia A. 2007. *The Determinants of Organizational Innovativeness: The adoptions of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. *Ph.D dissertation*, The Pennsylvania State University, United States-Pennsylvania. (Retrieved August 8, 2011, From Accounting & Tax Periodicals Publication No. AAT 3266180)

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Puspita, Rora dan Martani, Dwi. 2012. *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda*. (<http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id> diakses pada 16 April 2014)
- Riantiarno, Reynaldi dan Azlina, Nur. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Pekbis Jurnal (Vol. 3, No. 3; 560- 568)
- Sekaran. Uma. 2006. *Research Methods For Bussiness. A skill-Building Approach*. John wiley & Sons. Inc, New York
- Setiawan, Wahyu. 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang
- Setyaningrum, Safitri. 2012. *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Volume 9 Nomor 2, Desember 2012
- Sudarsana, Hafidh Sudarsana. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. (<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>) Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-13.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Dan Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia)* Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.
- Syahrudin. 2006. *Desentralisasi Fiskal : Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi Yang Konsisten*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang epublik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Warsito, Kawedar, Abdul Rohman dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik "Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah"*. Semarang : Widya Karya